

KEPEMIMPINAN SAHABAT BERDASARKAN KASIH AGAPE: Suatu Analisis terhadap Politik Identitas di Indonesia, khususnya NTT.

Samuel Benyamin Hakh
Pascasarjana, Fakultas Teologi
Universitas Kristen Arthawacana Kupang

samuelbenyamin.sb@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan sahabat telah dikaji oleh beberapa penulis, tetapi persoalan yang timbul adalah, apa model kepemimpinan sahabat itu? Sebab kepemimpinan sahabat itu bisa multi tafsir. Tujuan artikel ini adalah, untuk mengkaji kepemimpinan sahabat berdasarkan kasih *agape*, yakni kasih yang rela berkorban, kasih yang merangkul semua orang tanpa pamrih. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan cara kerja, mengumpulkan bahan-bahan literatur berupa artikel-artikel dan buku-buku untuk dianalisis, dalam usaha untuk mengungkap model persahabatan berdasarkan kasih *agape*. Hasil yang ditawarkan sebagai suatu perspektif baru bagi pembaca adalah, bahwa kepemimpinan sahabat yang berdasarkan kasih *agape* adalah kepemimpinan sahabat yang rela berkorban dan merangkul semua orang dari berbagai golongan, etnis, agama, dan budaya yang berbeda sehingga tercipta persahabatan yang kuat untuk saling bersinergi

Abstract

Friend leadership has been studied by several authors, but the problem that arises is, what is the friend leadership model? Because a friend's leadership can have multiple interpretations. The purpose of this article is to examine the leadership of friends based on agape love, namely love that is willing to sacrifice, love that embraces everyone without any strings attached. The method used is a literature research method by working, collecting materials from articles and books for analysis, in an effort to uncover a model of friendship based on agape love. The results offered as a new perspective for readers are that friend leadership based on agape love is the leadership of friends who are willing to make sacrifices and embrace all people from various groups, ethnicities, religions and different cultures so as to create strong friendships in mutual synergy.

Pendahuluan

Pokok pembahasan ini sangat relevan pada tahun 2023 karena bangsa Indonesia sedang berada di tengah pusaran tahun politik menghadapi Pilpres pada awal tahun 2024. Sebagaimana pengalaman perpolitikan di Indonesia pada Pilpres sebelumnya, politik identitas sangat mengemuka. Pembahasan tentang kepemimpinan sahabat dalam artikel ini merupakan suatu bentuk pendidikan politik bagi warga masyarakat, khususnya bagi para pemimpin politik dalam menentukan pilihan sesuai hati nuraninya masing-masing.

Pembahasan tentang kepemimpinan sahabat, telah dikaji oleh pakar di lingkungan Internaasional maupun Nasional. Ana M. Romero-Iribas, dan Consuelo Martínez-Priego, misalnya; dalam artikel mereka yang berjudul: *Developing leadership through education for friendship*, menawarkan analisis mereka bahwa persahabatan dan kepemimpinan mempunyai beberapa elemen yang sama dan bahwa pendidikan persahabatan merupakan nilai tambah dalam pelatihan kepemimpinan. Melalui analisis sifat kepemimpinan dan persahabatan, Romero-Iribas, dan Consuelo Martínez-Priego menyimpulkan bahwa kepemimpinan sahabat melibatkan serangkaian keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang berkembang melalui pengalaman persahabatan, dan bahwa nilai-nilai yang ditemukan menyatu

dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam persahabatan.¹ Romero-Iribas, dan Consuelo Martínez-Priego telah memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pendidikan kepemimpinan, namun belum membahas mengenai kepemimpinan berlandaskan kasih Agape.

Pakar lain yang juga membahas kepemimpinan sahabat adalah, Y. Waghid dan V. S. Mncube. Dalam pembahasannya, mereka menyatakan bahwa hubungan antar manusia harus digunakan sebagai ruang pedagogi untuk memupuk bentuk-bentuk persahabatan yang tidak hanya mendorong rasa saling menguntungkan tetapi juga cinta untuk memungkinkan pengambilan risiko di pihak pemimpin dan rekan-rekan mereka. Jika para pemimpin dan rekan-rekan mereka bertindak dengan rasa saling menguntungkan dan penuh kasih, mereka akan memiliki posisi yang lebih baik dalam masyarakat dan mempertahankan hubungan demokratis. Pembahasan Waghid dan Mncube mengacu kepada tanggung jawab sekolah negeri di Afrika Selatan untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dan mengajarkan serta melibatkan siswa dalam mewujudkan demokrasi, sosial keadilan, kesetaraan, non-rasisme dan non-seksisme, sehingga menjadi satu masyarakat yang bermartabat, terbuka, dan bertanggung jawab, serta memiliki supremasi hukum, rasa hormat, dan rekonsiliasi.² Kedua pakar ini memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga bagi kehidupan demokrasi, namun kedua pakar ini hanya menyoroti kepemimpinan sahabat itu secara sosiologis, sehingga mengabaikan aspek teologis.

Penulis yang membahas kepemimpinan sahabat secara teologis alkitabiah adalah Alvian Apriano. Ia mendasarkan kajiannya pada Yohanes 13:34, dan 15:13, 15. Dalam teks-teks itu, Yesus menyapa murid-murid-Nya sebagai sahabat dan saling mengasihi. Apriano dalam artikelnya yang berjudul “Model Kepemimpinan Kristen berbasis Teologi Persahabatan” mengkritisi kepemimpinan pelayan atau kepemimpinan hamba yang dikembangkan oleh Greenleaf, bahwa dalam kepemimpinan hamba akan selalu ada labelisasi status atasan dan status bawahan. Padahal, komunitas gereja itu liquid, se-liquid kasih persahabatan Allah.³ Apriano telah memberikan suatu sumbangan pemahaman mengenai kepemimpinan Kristen berdasarkan teologi persahabatan tetapi belum secara spesifik membahas persahabatan berdasarkan kasih agape.

Penulis lain, yang juga membahas mengenai kepemimpinan sahabat secara teologis adalah Linda Tumimba. Dalam artikelnya yang berjudul: “Kepemimpinan Sahabat dalam Gereja Mula-mula dan implikasinya bagi kehidupan gereja di masa kini: Eksegesi Teks Kisah Rasul 2: 42-47”. Dalam pembahasannya, Tumimba bertolak dari Kisah Rasul tentang kehidupan jemaat mula-mula yang menghadapi berbagai persoalan yang timbul. Tetapi oleh teladan kepemimpinan para rasul sehingga persoalan bisa diselesaikan dan persahabatan jemaat semakin meningkat.⁴ Gagasan yang disampaikan oleh Tumimba tentu memperkaya gagasan teologis mengenai kepemimpinan sahabat di kalangan jemaat mula-mula, namun ia bertolak dari Kisah Rasul 2: 42-47, sehingga focus pembahasannya tertuju pada kepemimpinan para rasul yang meneladani Yesus, dalam upaya mereka menyelesaikan persoalan dan meningkatkan persahabatan dalam jemaat, sehingga model persahabatan yang berdasarkan kasih agape itu tidak menjadi focus perbahasannya.

Merespons pandangan Romero-Iribas, dan Consuelo Martínez-Priego; Y. Waghid dan V. S. Mncube, Apriano serta Linda Tumimba, maka memang Romero-Iribas, dan Consuelo Martínez-Priego; Y.

1 Ana M. Romero-Iribas, dan Consuelo Martínez-Priego; “Developing leadership through education for friendship”, *Procedia Social and Behavioral Sciences* 15 (2011) 2248–2252

2 Y. Waghid dan V. S. Mncube, “Leadership and friendship: On the possibility of taking risks Le der hip and friendship O the o sibilit of taking riks”, *Journal SAJHE* 21 (2) 2007, 193-201

3 Alvian Apriano, “Model Kepemimpinan Kristiani Berbasis Teologi Persahabatan”, *Pengaruh: Jurnal Teologi Kristen*, vol., 2 no 2 (2020), 2,3

4 Linda Tumimba, Linda, “Kepemimpinan Sahabat dalam Gereja Mula-mula dan Implikasinya bagi kehidupan gereja di masa kini: Eksegesi Teks Kiasah Rasul 2: 42-47”, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Linda+Tumimba%2C+%E2%80%9CKepemimpinan+Sahabat+dalam+Gereja+Mulamula+dan+implikasinya+bagi+kehidupan+gereja+di+masa+kini%3A+Eksegesi+Teks++Kiasah+Rasul+2%3A+42-47&btnG=

Waghid dan V. S. Mncube melakukan pendekatan secara sosiologis terhadap kepemimpinan sahabat, sehingga mereka tidak secara khusus membahas kepemimpinan sahabat secara teologis. Namun mereka telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sahabat telah menjadi pokok menarik untuk dibahas di kalangan pakar yang berkecimpung dalam studi-studi kepemimpinan sahabat. Penulis yang membahas secara teologis Alkitabiah terhadap kepemimpinan sahabat adalah Apriano dan Linda Tumimba. Terhadap kedua penulis ini saya memberikan catatan kritis, bahwa dalam teks-teks tertentu dalam Perjanjian Baru terutama dalam Injil-Injil, kita bisa membaca tentang adanya berbagai ikatan persahabatan yang kita temukan di kalangan orang Yahudi. Ada ikatan-ikatan persahabatan yang terjalin berdasarkan kesamaan profesi, misalnya para ahli Taurat memiliki ikatan persahabatan sendiri, yang kadang-kadang bersoal jawab dengan Yesus (band. Yoh. 8:3-5). Selain itu, para Farisi juga memiliki ikatan persahabatan tersendiri pula. Mereka sering mencari berbagai taktik untuk menjebak Yesus agar Ia bisa dihukum karena wibawa mereka sebagai pemimpin agama, tergerus oleh pengaruh Yesus (band. Mrk. 3:6). Belum lagi ada persahabatan karena adanya persamaan ras. Orang Yahudi pada masa Yesus hanya bergaul dan makan bersama dengan orang Yahudi. Mereka tidak akan pernah masuk rumah orang non Yahudi, lalu makan bersama karena khawatir terkontaminasi oleh kenajisan orang non Yahudi (band. Kis.10:28). Di samping itu, ada persahabatan yang terjalin karena kesamaan partai. Kelompok Herodian, misalnya adalah partai yang mendukung Herodes Agung dan keluarganya sebagai penguasa di Palestina. Masing masing anggota kelompok ini memelihara ikatan persahabatan di antara mereka tetapi persahabatan yang mereka kembangkan itu hanya terbatas di antara anggota kelompok mereka sendiri sehingga terjadi pengkotak-kotakan di antara mereka. Itulah sebabnya pada waktu-waktu tertentu mereka mencari jalan untuk membunuh Yesus (band. Mrk 12:13,14) sekalipun Yesus sendiri adalah seorang Yahudi. Bahkan penyaliban Yesus dikayu salib merupakan wujud kebencian dari kelompok-kelompok persahabatan ini. Murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi pun dimusuhi karena mereka menjadi pengikut Yesus.

Benar, bahwa Yesus sendiri juga memiliki ikatan persahabatan dengan murid-murid-Nya, sebagaimana terungkap dalam Yohanes 15:12 dan Yesus sendiri menasihati para murid-Nya agar mereka saling mengasihi (Yoh., 13:34). Kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya bisa saja dipandang sebagai satu kelompok yang memiliki ikatan persahabatan karena mereka adalah pengikut Yesus, sama seperti setiap rabi Yahudi juga memiliki murid sendiri. Itulah sebabnya sapaan Yesus kepada murid-murid-Nya dalam Yohanes 15:13 sebagai sahabat, bisa saja dipahami sebagai persahabatan pada satu kelompok tertentu di bawah kepemimpinan Yesus.

Pertanyaan yang timbul adalah, apakah sapaan Yesus kepada murid-murid-Nya sebagai sahabat, dan nasihat-Nya kepada mereka untuk saling mengasihi, adalah persahabatan dan kasih yang hanya diberlakukan di dalam kelompok sendiri saja, sama seperti kelompok ahli Taurat dan orang Farisi serta kelompok Herodian itu? Menurut hemat saya, kalau bertolak dari Yohanes 15:13 dan 13:34, maka orang bisa menafsirkan sapaan itu sebagai kasih dan persahabatan yang hanya terbatas pada kelompok sendiri, padahal kasih dan persahabatan yang Yesus berlakukan selama pelayanan-Nya bukan kasih dan persahabatan yang terbatas pada anggota kelompok sendiri, melainkan kasih persahabatan yang mencakup semua orang dari berbagai latar belakang etnis, golongan, dan status social.

Benar, bahwa dalam Yohanes 15:13, Yesus menyapa murid-murid-Nya sebagai sahabat dan menasihati mereka agar mereka saling mengasihi. Nasihat ini hanya ditujukan kepada murid-murid-Nya saja, karena pada pasal-pasal itu, Yohanes menceritakan mengenai keadaan murid-murid (komunitas Yohanes) dalam ancaman para pemimpin Yahudi. Mereka yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan (band. Yoh 9:22). Karena itu, Yesus menasihati murid-murid-Nya agar mereka memperkuat persahabatan dan ikatan kasih di antara mereka supaya mereka tidak tercerai

berai dengan adanya tekanan dan ancaman dari para pemimpin agama Yahudi terhadap murid-murid itu.

Oleh sebab itu, ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan sahabat dan nasihat Yesus kepada murid-murid-Nya agar mereka saling mengasihi, tidaklah cukup untuk menjadikan Yoh. 15:13,15 dan Yohanes 13:34 sebagai dasar, melainkan kita juga perlu melihat laporan Injil-Injil secara menyeluruh. Tesis saya adalah, kepemimpinan sahabat yang Yesus berlakukan tidak hanya mencakup murid-murid-Nya saja, melainkan Ia juga memberlakukan model kepemimpinan sahabat itu yang mencakup semua orang dari berbagai latar belakang profesi, golongan, status sosial dan etnis selama pelayanan-Nya berdasarkan kasih agape. Kajian lebih jauh mengenai kasih agape ini akan dibahas dalam tahap-tahap berikut ini. Pertama, politik Identitas, Kedua, pemberlakuan kasih agape oleh Yesus, ketiga, mengkritisi Politik Identitas dari Sudut Pandang Kepemimpinan Sahabat, keempat, kesimpulan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi literatur. Menurut J.R. Raco, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁵ Lebih jauh, Raco merumuskan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁶ Berdasarkan definisi itu maka kiranya jelas bahwa penelitian kualitatif, berfokus pada makna dalam konteks dan pengumpulan data serta peka terhadap makna yang mendasarinya saat mengumpulkan dan menafsirkan data.⁷ Metode ini digunakan untuk mengkaji literatur-literatur yang dihimpun baik berupa buku maupun artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan ini. Sementara pokok-pokok pikiran yang dibahas dalam artikel ini menggunakan analisis-deskriptif

Hasil dan Pembahasan

Politik Identitas

Identitas diri merupakan ciri yang melekat pada setiap orang. Anggota masyarakat yang memiliki identitas yang sama, seperti bahasa, organisasi, agama, etnis, ideologi, bisa tumbuh perasaan “ke-kita-an” yang memungkinkan mereka memiliki kedekatan satu dengan yang lain. Hogg dan Abrams, dalam tulisan mereka yang berjudul “Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes”, mengemukakan bahwa anggota masyarakat dalam setiap negara terstruktur ke dalam kategori-kategori social menurut ras, suku, kelas social, jenis kelamin, pekerjaan, etnis, agama, di mana setiap kategori itu memiliki kekuatan ikatan antar pribadi dilakukan berdasarkan kategori yang sama.⁸ Sementara menurut Manuel Castells dalam tulisannya yang berjudul: “The Power of Identity, Society, Culture” mengemukakan bahwa identitas merupakan sumber makna diri yang timbul pada diri setiap individu atau kelompok. Identitas diri tersebut terbentuk ketika ia diinternalisasi oleh individu-individu yang bersangkutan. Castells memilah identitas diri ini dalam tiga kategori. Pertama, ia sebut sebagai *legitimate identity*, yaitu identitas yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan institusi dominan dari satu kelompok masyarakat untuk memperluas dan merasionalkan dominasi terhadap pelaku social. Kedua,

5 R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 2

6 R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 5

7 Sharan B. Merriam, *Qualitative Research, A Guide to Design and Implementation* (San Fransisco: Jossey Bass, 2009), 2.

8 Hogg, Michael and Abrams, Dominic, *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. (Routledge, London: 1990),2,3

resistance identity yaitu identitas yang dipertahankan dengan melakukan perlawanan terhadap kelompok yang mendominasi demi mempertahankan perbedaan prinsip yang dipegang. *Resistance identity* ini merupakan suatu perjuangan yang dilakukan dengan gigih untuk memperoleh pengakuan dari kelompok lain. Ketiga, *project identity*, merupakan suatu bentuk aksi yang dilakukan untuk membangun identitas yang baru dengan tujuan mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat di mana mereka berada.⁹

Mengamati pandangan Hogg dan Abrams serta pandangan Manuel Castells, maka Hogg dan Abrams menekankan bahwa setiap negara terbentuk kategori-kategori social menurut ras, suku, kelas social, jenis kelamin, pekerjaan, etnis, agama, sementara Manuel Castells memilah identitas diri ini dalam tiga kategori yaitu: *legitimate identity*, *resistance identity* dan *project identity*. Pandangan mereka merupakan suatu realitas dalam masyarakat kita saat ini. Indonesia, misalnya, terdiri dari berbagai suku, ras, agama, ideologi politik, status social yang memiliki “ikatan ke-kitaan” yang sangat kuat sehingga bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi, antara lain konstetasi politik atau etnis. Yang menarik dari pandangan Castells adalah, bahwa ia mengangkat *resistance identity*, untuk menunjukkan identitas yang dipertahankan oleh kelompok tertentu dan dengan gigih mereka melakukan perlawanan terhadap kelompok yang mendominasi. Kegigihan dalam melakukan perlawanan ini, terbukti telah dilakukan oleh kelompok pendukung tertentu dengan berbagai upaya antara lain, menyebarkan isu etnis dan agama melalui media cetak dan media elektronik terhadap lawan politiknya, dan juga melalui ancaman terhadap warga masyarakat, bahwa mereka yang memilih kelompok lawan tidak akan disolat pada waktu meninggal. Ternyata upaya mereka berhasil, misalnya dalam pilkada DKI.

Maka bisa dikatakan bahwa politik identitas adalah politik yang terkait dengan masalah etnis, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan local lainnya misalnya kepentingan untuk memperoleh pengakuan dari penguasa bahkan merebut kekuasaan. Politik identitas ini muncul karena para penggagas dari model politik ini merasa diperas, dipinggirkan, hak-hak mereka tidak diakui, dan dianiaya serta didominasi oleh arus besar di dalam satu negara. Sebagai contoh, model politik identitas ini muncul di Amerika pada tahun 1960-an, sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan social yang dialami oleh kelompok-kelompok ras kulit hitam, dan etnis-etnis lain, sebagai kelompok minoritas, yang merasa diperlakukan secara tidak adil, bahkan dilindas oleh roda pemerintahan yang dipegang oleh kelompok kulit putih yang berkuasa. Di kemudian hari model politik ini meluas kepada kelompok-kelompok agama, ideologi dan budaya tertentu.¹⁰

Di Indonesia, secara Nasional, politik identitas ini sudah muncul ke permukaan sejak kemerdekaan Indonesia, terutama terkait dengan penyusunan dasar negara, khususnya sila yang pertama. Ada kelompok agama tertentu menghendaki agar negara berdasarkan agama tertentu. Sementara kelompok lain yang berhaluan Nasionalis menentangnya dan lebih mengusulkan agar dasar negara itu merangkum semua agama di Indonesia. Walaupun pada akhirnya perjuangan kelompok Nasionalis disetujui, tetapi gagasan mengenai agama dari kelompok yang menghendaki agama tertentu sebagai dasar negara masih terus hidup sebagai sebuah ideologi di kalangan penganut agama itu.

Politik identitas ini lebih berhubungan dengan agama, suku, dan ideologi yang diprakarsai oleh elit-elit politik tertentu. Demi menggolkan cita-cita mereka maka berbagai cara mereka tempuh. Ada yang dengan melakukan protes melalui demo-demo terhadap penguasa di depan umum, mulai dari demo yang bersifat damai hingga demo yang melakukan kekerasan. Demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh FPI pada pemilihan umum 2019 dan pemilihan gubernur DKI

9 Castells, Manuel, (2010), *The Power of Identity: The Information age, Economy, Society, Culture*. Vol. 2, Blackwell Publishing Ltd United Kingdom, xvii, xviii

10 Syafii Maarif, Ahmad, (2012), *Politik Identitas dan Masa depan Pluralisme di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 3

merupakan bukti yang kuat mengenai keberadaan politik identitas ini. Ada pula yang menyusup melalui berbagai bidang, antara lain, bidang pemerintahan, dan bidang politik. Dalam bidang pemerintahan bisa terlihat dalam berbagai perda syariah yang dihasilkan dan diberlakukan diberbagai daerah tertentu di Indonesia, sedangkan dalam bidang politik dapat dilihat pada kemunculan berbagai partai politik di Indonesia yang mengusung agama tertentu.

Politik identitas ini digunakan untuk membangun solidaritas kelompok dengan maksud untuk melakukan perjuangan demi mencapai cita-cita tertentu, misalnya mengganti dasar negara dengan ajaran agama tertentu. Perjuangan dari kelompok identitas ini adalah sebagai akibat dari ketidak-puasan mereka terhadap sistem pemerintahan yang diberlakukan. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1950-an Muhammad Natzir merasa tidak puas dengan kebijakan Soekarno yang menerapkan demokrasi terpimpin, sehingga ia menyampaikan kritik terhadap Soekarno. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa demi kepentingan kesejahteraan rakyat maka partai Masyumi akan menerapkan doktrin Islam kepada setiap individu dan hukum Islam terhadap negara. Bagi maksud itu ia mengusulkan agar agama Islam dijadikan sebagai dasar negara dan perjuangan politik. Alasan Natzir, yang dikutip oleh Harun Arrasyid, adalah karena ajaran Islam mempunyai sifat-sifat sempurna bagi kehidupan negara.¹¹

Salah satu tokoh Masyumi lainnya yang juga memiliki pengaruh yang cukup besar adalah Zainal Abidin Ahmad. Sama dengan Natzir, Ahmad juga memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Ada dua alasan yang ia kemukakan. Pertama, mayoritas penduduk di Indonesia adalah penganut beragama Islam. Kedua, golongan minoritas harus dijamin hak-haknya. Sebab negara Islam seperti yang diciptakan oleh Nabi Muhammad di Medinah tidak hanya terdiri dari umat Islam melainkan juga terdiri dari orang munafik dan orang Yahudi. Oleh sebab itu, terhadap kelompok agama selain Islam, ia tidak menyebutnya sebagai kelompok minortas, melainkan warga negara yang baik, yang memiliki hak yang sama dengan warga negara yang beragama Islam.¹² Menyimak pandangan Natzir dan Ahmad maka padangan Ahmad lebih demokrat dan merangkul perbedaan. Hanya saja baik Natzir maupun Ahmad ingin mengganti dasar negara dengan syariat Islam.

Pada era Reformasi, politik identitas ini muncul ke permukaan lagi. Memang, salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan satu Indonesia yang demokratis, yang dicapai dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat melalui pemilihan secara langsung dengan maksud agar rakyat memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih.¹³ Namun, tujuan demokrasi ini juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengembangkan politik identitas.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka PILKADA dimasukkan dalam UU itu sehingga secara resmi pemilihan Kepala Daerah diberlakukan. Kemudian dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2014, daerah diberikan peluang untuk melakukan PILKADA dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerah memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk menentukan masa depan daerahnya masing-masing.¹⁴

Dengan demikian, rakyat memiliki hak untuk memberikan mandate kepada figur-figur yang dipandang memiliki kapabilitas untuk memimpin Lembaga Legislatif maupun Eksekutif di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kepemilikan hak pilih oleh rakyat dimanipulasi oleh elit politik tertentu dengan simbol-simbol keagamaan dan etnis yang melekat pada calon-calon yang dipilih, sebab simbol-simbol ini dianggap memiliki nilai tawar yang sangat

11 Arrasyid, Harun, (2019), *Dinamika Perpolitikan Indonesia 1955-1959: Dialektika antara Pemilihan Umum dan Politik Identitas* (Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, 77,78

12 Ali, Sukri, (2020), *Politik Identitas Agama (Studi kasus politisasi agama pada pemilihan Bupati Morotai 2011*, (Morotai: Fakultas Ilmu Politik Universitas Pasifik Morotai), 23,24

13 Dari, Alfridus S.D., "Isu Identitas Pada Kontestasi Pilkada di NTT tahun 2018", Jurnal Politicon, Jurnal Program Studi Ilmu Politik – Vol X No. 1 (April 2021), 98

14 Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia " *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, vol. 4, no. 4 (Juni 2019), 15

tinggi bagi para pemilih. Karena tingkat pendidikan politik rakyat masih rendah maka terjadi pengkotak-kotakan dalam memilih. Rakyat memilih antara figur yang berkualitas dan berintegritas atau memilih figure yang memiliki kesamaan identitas.¹⁵ Apalagi jika kampanye pemilihan itu diembeli dengan berbagai bujukan materi, ejekan dan ancaman dari kelompok agama atau etnis tertentu maka rakyat tidak lagi secara obyektif dan rasional memberikan hak pilihnya. Keadaan seperti ini, misalnya terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Pidato Ahok di pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menyinggung Surah Al-maidah 51 diangkat ke permukaan sehingga memicu reaksi pro dan kontra dalam masyarakat khususnya masyarakat di DKI. Tidak hanya itu. Isu minoritas pada diri Ahok yang memiliki etnis Cina dan beragama Kristen mempertajam pro kontra antar etnis. Keadaan pro dan kontra itu ditambah lagi dengan aksi bela Islam yang diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang memobilisasi umat Islam untuk menuntut secara hukum terhadap Ahok karena pengutipan surah Al-maidah 51 sebagai penghinaan terhadap Al-Quran.¹⁶ Oleh karena upaya perlawanan yang gigih dari kelompok tertentu dalam Islam itu maka dalam pemilihan gubernur itu, politik identitas mencapai tujuannya secara signifikan dengan perolehan suara: Anis Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno 3.240.332 atau 57,95% dari total pemilih yang sah,¹⁷ sehingga mereka mengalahkan pasangan Ahok-Jarot.

Di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, tatanan sosial sangat mempengaruhi politik identitas, terutama terkait dengan keberagaman etnis dan agama. Dengan adanya kepelbagaian etnis dan agama di NTT maka politik identitas berdasarkan suku dan agama sangat mewarnai kontestasi dalam PILKABA NTT. Di NTT terdapat dua suku besar yang terkotak-kotak dalam kontestasi PILKADA yaitu suku/etnis Flores dan Timor serta agama Katolik yang memiliki basis di pulau Flores dan agama Protestan yang memiliki basis di Timor dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Situasi yang demikian, sangat dimanfaatkan oleh para politisi tertentu di NTT untuk melakukan komunikasi politik dengan warga masyarakat untuk mendulang suara dalam PILKADA.

Dalam satu survey yang dilakukan oleh Losta Institute mengenai perilaku pemilih di masyarakat NTT pada tahun 2018, membuktikan bahwa politik identitas berdasarkan suku dan agama masih menduduki posisi tertinggi dari para pemilih. Dari 1200 sampel yang diminta pendapatnya, pilihan berdasarkan etnis tercatat 26,7 % menyatakan sangat penting dan 42,8% menyatakan cukup penting, hanya 13,5 % kurang penting dan 8,3 % tidak penting sama sekali. Lalu ketika ditanyakan mengenai pemilihan berdasarkan latar belakang agama, maka tercatat pemilih yang beragama Katolik 15,3 % menyatakan sangat penting dan 34,4 % menyatakan cukup penting, 20,5% kurang penting, dan hanya 13,8% tidak penting sama sekali. Sementara agama selain Katolik 17,6% sangat penting, 39,6% cukup penting, 20,1%, kurang penting, dan hanya 12, 7% tidak penting sama sekali.¹⁸ Dari data-data ini terbukti secara jelas bahwa, pemilihan berdasarkan etnis dan agama masih sangat dominan bagi para pemilih di NTT dengan persentasi yang sangat tinggi. Politisasi etnis dan agama ini juga sangat mempengaruhi rekrutmen calon-calon yang ditampilkan untuk bersaing dalam PILKADA. Memang, kepelbagaian identitas suku dan agama di NTT, merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari tetapi jika dikelola dengan arif dan bijaksana maka akan bisa memperkaya dan memakmurkan masyarakat di daerah NTT. Namun, ketika identitas etnis dan agama ini dijadikan sebagai kekuatan politik yang menyebabkan polarisasi dalam masyarakat NTT maka akan bisa menimbulkan persolan. Persoalan yang timbul adalah bisa menimbulkan

15 Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017", 12,13.

16 Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017", 15,16

17 Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017", 12,13.

18 Alfridus S.D. Dari, "Isu Identitas Pada Kontestasi Pilkada di NTT tahun 2018" .103

ujaran kebencian, dendam, konflik horizontal, konflik kultural, dan kekerasan yang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan di daerah bahkan di tingkat Nasional.¹⁹

Sebagai contoh, kita perlu belajar dari beberapa negara di dunia yang terpecah belah karena konflik yang menyebabkan banyak pertumpahan darah, sebagai akibat dari politik identitas. Di Skotlandia, perang saudara antara kelompok Protestan melawan kelompok Katolik menimbulkan pertumpahan darah dan trauma di kedua belah pihak, perang saudara antar etnis kulit putih melawan kulit hitam di Amerika, perang saudara yang memecah belah persaudaraan di Yugoslavia, Suriah, Afganistan.²⁰ Munculnya ISIS yang menimbulkan perang saudara di Irak, di mana semua orang yang tidak menaati ajaran yang mereka kembangkan, akan dibunuh, Pengeboman Menara kembar *World Trade Center* pada 21 September 2001 di Amerika Serikat.²¹ Di Indonesia sendiri pernah terjadi pengeboman terhadap rumah-rumah ibadah, perang saudara di Maluku, di Poso, yang menimbulkan pertumpahan darah. Semua itu terjadi sebagai akibat dari politik identitas. Oleh sebab itu, kita perlu waspada terhadap “virus” politik identitas yang saat ini masih menyebar di mana-mana.

Pemberlakukan kasih Agape oleh Yesus dalam pelayanan-Nya

Di Tengah kepelbagaian latar belakang di kalangan orang Yahudi, Yesus memberlakukan kasih agape dalam pelayanan-Nya. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak membedakan golongan, etnis dan agama. Kasih agape itu adalah kasih yang juga merangkul semua orang, baik kawan maupun lawan, bahkan merangkul mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Kasih itu Yesus berlakukan selama pelayanan-Nya di kalangan bangsa Yahudi, yang di dalamnya terdapat berbagai, golongan, etnis dan status social yang berbeda, bahkan Yesus juga merangkul orang Samaria yang pada masa itu bermusuhan dengan orang Yahudi (band. Yoh. 4:40).

Misalnya Yesus makan bersama dengan Simon, seorang Farisi yang mengundang Dia dalam jamuan yang ia lakukan (Luk. 7:36,37). Ia juga bersahabat dan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa (Mat.9:10; Luk. 19:7), sekalipun Ia mendapat sungut-sungutan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat (band. Luk. 15:2). Ia juga bersahabat dengan orang Samaria. Walaupun pada waktu itu orang Yahudi tidak beramah-ramahan dengan orang Samaria karena orang Samaria dipandang sebagai bangsa kafir sebab mereka tidak lagi murni sebagai orang Yahudi.²² Namun Yesus tinggal bersama dengan orang Samaria selama dua hari (Yoh. 4: 40). Selama dua hari itu, tentu Yesus makan sehidangan dengan mereka. Suatu tindakan yang bagi orang Yahudi adalah haram tetapi tindakan Yesus untuk membangun persahabatan dengan para pemungut cukai, orang berdosa, serta orang Samaria, merupakan suatu terobosan terhadap kepemimpinan sahabat yang sempit dan membuktikan suatu model kepemimpinan sahabat berdasarkan kasih agape, yang tidak hanya mengayomi anggota-anggota persekutuan sendiri atau anggota kelompok etnis sendiri bahkan para pendukung dari anggota-anggota partai sendiri, melainkan juga mengayomi semua orang dari berbagai latar belakang status social, etnis dan agama. Mereka semua dipandang sebagai sahabat yang patut diayomi. Itulah model kepemimpinan sahabat berdasarkan

19 Karel Francius Noni Nope, at al., “Politisasi Identitas dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018” *Jurnal Wahana Publik*, vol 15, no. 21 (Juni 2021), 36

20 Lili Salman Al-Farisi, “Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila” *Jurnal Aspirasi* (2020), 77

21 Maisi Rafidah, “Perspektif Islamophobia Pasca Tragedi 11 September 2001”, *Local History and Heritage*, Vol. 1, Issue 1, Maret 2021, 15,16

22 Harming, “Metode Penginjilan Yesus dakan Injil Yohanes 4:1-42”, *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2017, 163-165

kasih Agape, suatu model kepemimpinan yang terbuka bagi semua orang. Memang, perlu juga diwaspadai karena model kepemimpinan sahabat yang terbuka bagi semua orang dari berbagai status social, profesi, etnis dan partai yang berbeda-beda itu bisa menjadi musuh dalam salimut atau seperti yang dikatakan oleh Joas Adiprasetya bahwa kehadiran yang berbeda itu bisa menjadi actor antagonis yang subversive.²³ Dalam kaitan ini, menarik apa yang dikatakan oleh Jurgen Moltmann bahwa pengharapan di dalam Kristus memungkinkan keterbukaan terhadap yang lain, artinya bagaimana kita bisa melampaui budaya kesamaan dan mencintai mereka yang lain, yang tidak layak atau yang tidak berharga.²⁴ Kecenderungan gereja adalah lebih melihat keseragaman dan kesamaan dalam persekutuan jemaat dan menolak perbedaan. Gereja lebih mengharapkan lebih banyak keseragaman dan kesamaan meskipun dalam balutan yang berbeda dari pada perbedaan. Menurut Moltmann kecenderungan seperti itu bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Moltmann menyebut kecenderungan yang hanya menekankan keseragaman itu merupakan suatu pandangan sekuler dan membentuk suatu rasa aman sendiri sebagai suatu *ghetto* kelompok yang berusaha mengenyahkan semua kekhasan dalam persekutuan jemaat.²⁵ Moltmann, yang dikutip oleh Stephen Rhodes, menegaskan bahwa kunci dari model persahabatan dengan yang berbeda itu adalah persahabatan di dalam Tuhan. Bahwa Bapa Putera dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda tetapi satu keesaan di dalam kasih yang menjiwai kehidupan Allah. Moltmann menjawab bahwa kunci dari misteri ini adalah persahabatan di dalam Tuhan. Sebagaimana diajarkan oleh gereja mula-mula bahwa Tuhan adalah satu dalam kesatuan cinta di antara tiga pribadi Trinitas.²⁶ Menurut pendapat saya, pandangan Moltmann sangat menarik dalam kaitan dengan model kepemimpinan sahabat, karena ia membuka suatu wawasan pemahaman yang lebih luas mengenai model kepemimpinan sahabat, bahwa kepemimpinan sahabat itu tidak hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki kesamaan dalam pandangan, suku, idiologi, dan golongan, melainkan juga mencakup semua orang yang memiliki pandangan, golongan, idiologi, dan etnis yang berbeda. Sebab jika perbedaan itu dikelola secara arif maka akan sangat memperkaya wawasan kita

Pertanyaan yang timbul adalah, apa dasar teologis yang mendorong Yesus memberlakukan model kepemimpinan sahabat berdasarkan kasih yang terbuka bagi semua orang, semua etnis, dan bagi semua status social? Yesus memberlakukan kepemimpinan sahabat yang terbuka itu berdasarkan kasih agape yang tidak hanya terbatas kepada semua orang dari latar belakang status social, etnis, dan budaya yang sama. Kasih yang Yesus berlakukan itu bukan kasih yang sempit, melainkan kasih yang melampaui batas-batasn suku, ras, status social, golongan dan agama. Dengan mengangkat inti sari dari Dekalog, Yesus mengajarkan kasih itu kepada para pendengar-Nya agar mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri (Mat. 22: 39). Yesus menolak pandangan di kalangan para pemimpin orang Yahudi yang hanya mengasihi sesama yang mengasihi mereka, sebaliknya mereka membenci orang yang membenci mereka (Mat 5:43). Berseberangan dengan pandangan orang Yahudi pada zaman Yesus itu, Yesus mengajarkan dan memberlakukan kasih yang melampaui tembok-tembok pemisah yang dibangun antara kawan dan lawan, ketika Ia berkata: "Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka (Mat. 5:44). Lebih jauh, secara retorik Yesus berkata kepada para pendengarnya: "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang

23 Adiprasetya, Joas, "Berteologi dalam perjumpaan dengan yang lain", *Jurnal Proklamasi*, 2 (1) 2002, 45.

24 Moltmann, Jurgen, (1975), *Theology of Hope* (San Francisco: Harper and Row), 32

25 Moltmann, Jurgen, (1975), *The Crucified God* (San Francisco: Haeper and Row), 28.

26 Rhodes, Stephen, "Jorgen Moltmann: The Comfort Challenge of Open Friendship", *The Asbury Theological Journal*, vol. 49, no.1 (1994), 67

yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?” (Mat. 5:46,47). Dalam perkataan lain, kasih yang Yesus ajarkan itu merupakan kasih yang mencakup semua orang. Kasih yang demikian, perlu diberlakukan oleh seorang pemimpin politik dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.

Mengkritisi Politik Identitas dari Sudut Pandang Kepemimpinan Sahabat

Pembahasan kita mengenai kepemimpinan sahabat, telah kita tegaskan bahwa kepemimpinan sahabat adalah kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan kasih, yakni kasih yang melampaui semua batas-batas suku dan agama, status social, dan idiologi. Singkatnya, dalam kepemimpinan sahabat, sang pemimpin tidak hanya mengasihi, mengayomi dan memberikan perhatian bagi para pemilih atau pendukungnya melainkan juga, ia wajib mengasihi, mengayomi dan memberikan pelayanan bagi mereka yang tidak mendukung bahkan yang membencinya.²⁷ Benturan-benturan di antara kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang itu perlu diselesaikan secara arif. Sebab dengan demikian, persahabatan, persaudaraan, dan persatuan tetap dijaga sebagai modal dalam mencapai tujuan bangsa yang ingin dicapai yaitu keadilan social dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁸ Itu berarti bahwa, dalam kepemimpinan sahabat, sang pemimpin wajib memiliki kasih *agape* itu agar ia mampu merangkul atau mengayomi semua anggota masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, idiologi, status social, gender yang berbeda-beda.

Sementara dalam politik identitas, persahabatan dan kasih yang diberlakukan adalah persahabatan dan kasih yang sempit, yang hanya mencakup etnis, agama, suku, idiologi, dan golongan tertentu dari para pendukung sang pemimpin itu. Memang secara politis, dikatakan bahwa sebagai seorang pemimpin yang terpilih, sang pemimpin merangkul semua etnis, suku, agama dan status sosial yang berbeda-beda, tetapi dalam kenyataan apa yang dikatakan secara verbal tidak jatuh sama dengan kenyataan dalam praktek di lapangan. Karena sang pemimpin yang dipilih berdasarkan suku dan agama serta idiologi tertentu, secara psikologis memiliki kewajiban moral untuk membalas budi secara moral maupun material kepada para pemilihnya yang telah memilihnya sebagai pemimpin pada saat pemilihan, sementara kelompok lain, yang tidak memilihnya diabaikan bahkan dianak-tirikan. Mereka kurang diberikan perhatian dalam upaya menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang lebih diperhatikan adalah mereka yang memilihnya sebagai pemimpin. Padahal tujuan pembangunan bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Tindakan yang demikian, adalah satu bentuk tindakan diskrimatif, dan merupakan suatu pelanggaran berat terhadap cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila yang kelima, yakni mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, tindakan diskriminatif seperti itu harus dikikis habis, sebab keadaan ini bisa menimbulkan iri hati dan dendam dari kelompok yang kalah pada waktu kontestasi, tidak hanya terhadap sang pemimpin yang sedang berkuasa melainkan juga terhadap para pendukungnya sehingga lebih memperbesar gap atau perpecahan dalam masyarakat. Jika keadaan ini tidak dikelola secara arif dan bijaksana maka bisa menimbulkan polarisasi dalam proses pemerintahan, dan sudah tentu mempengaruhi tujuan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu, figure yang terpilih sebagai seorang pemimpin, wajib mengayomi semua warga negara yang dipimpinnya, baik mereka yang memilihnya maupun mereka yang kalah dalam pemilihan karena semua warga negara adalah anak-anak bangsa yang harus diperlakukan secara sama berdasarkan kasih *agape* itu.

27 Manimpan Hutasoit, “Sentralitas Kasih”, *Jurnal Teologi Anugerah* Vol. VIII No. 2 (Tahun 2019), 74-75

28 Efesus Suratman, Sadrakh Sugiono; “Implementasi Ajaran Kasih Dalam Mewujudkan Sila Persatuan Indonesia di Tengah-tengah Kemajemukan”, *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2023), 25,26

Kesimpulan

Berasarkan pembahasan kita terhadap pokok tentang Kepemimpinan Sahabat berdasarkan kasih agape ini maka kiranya jelas bahwa kepemimpinan sahabat yang digunakan dalam politik identitas, lebih bersifat kepemimpinan sahabat yang sempit, karena dilakukan berdasarkan persahabatan yang sempit, yaitu hanya ditujukan kepada kelompok pendukung tertentu pada saat pemilihan. Sikap yang demikian bisa menimbulkan kebencian dan dendam yang terpendam sehingga sewaktu-waktu bisa meletup dalam bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan, dan terror terhadap lawan politik, bahkan bisa terjadi perang saudara yang menimbulkan pertumpahan darah.

Oleh sebab itu, dalam tantangan politik identitas yang marak digunakan oleh masyarakat tertentu, sang pemimpin wajib memberlakukan model kepemimpinan sahabat yang merangkul dan mengayomi semua orang sebagai ciptaan Tuhan. Memang dalam kontestasi politik bisa saja seorang pemimpin dicalonkan dan didukung oleh partai atau kelompok partai bahkan kelompok etnis dan agama tertentu, tetapi sang pemimpin yang terpilih itu wajib merangkul semua orang yang memiliki latar belakang etnis, agama dan idiologi yang berbeda berdasarkan kasih agape yaitu kasih yang melampaui batas-batas etnis, agama dan idiologi, dengan maksud untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, aman dan sejahtera.

---,,---

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetya, Joas, “Berteologi dalam perjumpaan dengan yang lain”, *Jurnal Proklamasi*, 2 (1) 2002, 45.
- Al Farisi, Lili Salman, “Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila” *Jurnal Aspirasi* (2020), 77
- Ali, Sukri, (2020), *Politik Identitas Agama (Studi kasus politisasi agama pada pemilihan Bupati Morotai 2011)*, (Morotai: Fakultas Ilmu Politik Universitas Pasifik Morotai), 23,24
- Arrasyid, Harun, (2019), *Dinamika Perpolitikan Indonesia 1955-1959: Dialektika antara Pemilihan Umum dan Politik Identitas* (Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, 77,78
- Castells, Manuel, (2010), *The Power of Identity: The Information age, Economy, Society, Culture*. Vol. 2, Blackwell Publishing Ltd United Kingdom, xvii, xviii
- Dari, Alfridus S.D., “Isu Identitas Pada Kontestasi Pilkada di NTT tahun 2018”, *Jurnal Politicon, Jurnal Program Studi Ilmu Politik – Vol X No. 1* (April 2021), 98
- Harming, “Metode Penginjilan Yesus dalam Injil Yohanes 4:1-42”, *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2017, 163-165
- Hogg, Michael and Abrams, Dominic, *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. (Routledge, London: 1990), 2,3
- Hutasoit, Manimpan, “Sentralitas Kasih”, *Jurnal Teologi Anugerah* Vol. VIII No. 2 (Tahun 2019), 74-75
- Lestari, Dina, “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia “ *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, vol. 4, no. 4 (Juni 2019), 15
- Maarif, Syafii Ahmad, (2012), *Politik Identitas dan Masa depan Pluralisme di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 3
- Moltmann, Jurgen, (1975), *Theology of Hope* (San Francisco: Harper and Row), 32
- Moltmann, Jurgen, (1975), *The Crucified God* (San Francisco: Harper and Row), 28.
- Nope, Karel Francius Noni, et al., “Politisasi Identitas dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018” *Jurnal Wahana Publik*, vol 15, no. 21 (Juni 2021), 36
- R. Raco, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo,
- Rafidah, Maisi, “Perspektif Islamophobia Pasca Tragedi 11 September 2001 ”, *Local History and Heritage*, Vol. 1, Issue 1, Maret 2021, 15,16
- Rhodes, Stephen, “Jorgen Moltmann: The Comfort Challenge of Open Friendship”, *The Asbury Theological Journal*, vol. 49, no.1 (1994), 67
- Suratman, Efesus; Sugiono, Sadrah; “Implementasi Ajaran Kasih Dalam Mewujudkan Sila Persatuan Indonesia di Tengah-tengah Kemajemukan”, *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2023), 25,26
- Tumimba, Linda, “Kepemimpinan Sahabat dalam Gereja Mula-mula dan Implikasinya bagi kehidupan gereja di masa kini: Eksegesi Teks Kiasah Rasul 2: 42-47”,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Linda+Tumimba%2C+%E2%80%9CKepemimpinan+Sahabat+dalam+Gereja+Mulamula+dan+implikasinya+bagi+kehidupan+gereja+di+masa+kini%3A+Eksegesi+Teks++Kiasah+Rasul+2%3A+42-47&btnG=
- Waghid, Y dan Mncube, V.S., “Leadership and friendship: On the possibility of taking risks Leadership and friendship On the possibility of taking risks”, *Journal SAJHE* 21 (2) 2007, 193-201